

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK

MIGAS

ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI

UMUM

PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP OKT NOV **DES** 31
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 18

TAHUN 2008

Produsen Baja Turunkan Target

TOKYO (SINDO) - Produsen Baja Jepang, Nippon Steel Corp dan JFE Holdings Inc, akan memotong perkiraan laba operasi tahun ini. Pasalnya, permintaan baja dari industriomotif dan konsumen lainnya turun.

Harian *Nikkei* memberitakan, Nipon Steel dan JFE merupakan pemasok utama baja untuk Toyota Motor Corp dan produsen mobil Jepang lainnya. Penurunan permintaan mobil berujung pada turunnya permintaan baja kepada Nipon Steel dan JFE.

Nippon Steel menurunkan prediksi target laba 2008 menjadi 480 miliar yen (USD5,3 miliar) dari ramalan sebelumnya 540 miliar yen. Sementara JFE Holdings kemungkinan memotong prediksinya menjadi 450 miliar yen dari perkiraan sebelumnya 490 miliar yen.

(Rtr/ahmad)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input checked="" type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> KORAN KONTAN <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA	<input type="radio"/> SUARA KARYA <input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST	
KODE: <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF	<input checked="" type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI <input type="checkbox"/> GEOLOGI	<input type="checkbox"/> UMUM <input type="checkbox"/> PANSUS ANGKET
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP OKT NOV DES		
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		
HALAMAN : A17		TAHUN 2008

Harga Batu Bara Industri Tidak Naik

JAKARTA — Ketua Asosiasi Pengusaha Batu Bara Indonesia Jeffrey Mulyono memastikan sejauh ini tidak ada rencana untuk menaikkan harga batu bara industri. "Tidak logis karena (harga) minyak sedang turun, batu bara juga ikut turun," kata dia saat dihubungi *Tempo* kemarin.

Ia menanggapi kabar tentang rencana produsen menaikkan batu bara untuk industri dari US\$ 40 per ton *freight on board* (FOB) menjadi US\$ 70 hingga US\$ 75 per ton untuk kapasitas 5.000 hingga 6.000 kalori. Kenaikan harga tersebut mengikuti harga indeks batu bara Indonesia (ICI/Indonesia Coal-Price Index).

Jika tahun ini ada kalangan industri yang membeli batu bara dengan harga US\$ 40 per ton FOB, Jeffrey menduga komoditas yang dibeli berasal dari penambangan ilegal. Sebab, sepengetahuan dirinya, sepanjang tahun ini harga batu bara untuk industri lebih dari US\$ 40 per ton FOB. "Mungkin mereka membeli

langsung dari *trader*, yang mengambil batu bara dari produsen ilegal.

Ia mengungkapkan harga batu bara untuk 6.300 kalori dalam beberapa bulan terakhir berada di level US\$ 70 hingga US\$ 80 per ton FOB. Ketika harga minyak lebih dari US\$ 140 per barel, harga batu bara sempat mencapai US\$ 150 hingga US\$ 160 per ton FOB.

Presiden Direktur Bosowa Corporation Erwin Aksa pun menilai kabar rencana kenaikan harga batu bara itu tak relevan ketika harga minyak dunia justru tengah melorot. "Penggunaan indeks seharusnya untuk batu bara yang diekspor saja. Masak untuk industri lokal harganya mahal," Erwin menegaskan.

Kalau harga batu bara naik, maka industri seperti semen, listrik, dan tekstil akan mengalami dampak terberat. Erwin berharap pemerintah akan tetap berpihak untuk memajukan sektor industri dalam negeri. ● SORTA TOBING

a

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

- KODE: LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

- MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI
 GEOLOGI

- UMUM
 PANSUS ANGKET

AN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 10

TAHUN 2008

Perdana Karya Siapkan Rp 100 M untuk Tambang Baru

JAKARTA – PT Perdana Karya Perkasa Tbk (PKPK) menyiapkan dana Rp 100 miliar untuk mengoperasikan dua tambang batubara baru di Marangkayu dan Semoi, Kaltim. Kedua tambang itu ditargetkan beroperasi mulai kuartal III-2009 dengan kapasitas produksi sebanyak 160 ribu metrik ton.

Direktur Keuangan Perdana Karya Perkasa Soeroso menjelaskan, perseroan akan menggunakan kas internal sebesar Rp 20 miliar atau 20% dari total investasi untuk tambang baru tersebut. Sisanya yang sebesar 80% atau Rp 80 miliar akan diperoleh dari Komatsu Astra Finance, PT CIMB-Niaga Tbk (Bank Lippo), dan PT Bank Central Asia Tbk.

“Dengan pengoperasian dua tambang baru di Marangkayu dan Semoi, serta di Teluk Dalam, Bantuas, dan Dondang, kami menargetkan total produksi batubara pada 2009 mencapai 1,2 juta metrik ton. Sedangkan 2010 dan 2011, masing-masing 1,4 dan 1,46 juta metrik ton,” kata Soeroso dalam paparan publik perseroan di Jakarta, belum lama ini.

Perdana Karya juga juga berupaya meningkatkan kinerja di sektor konstruksi. Pada 2009, perseroan akan melanjutkan sejumlah kontrak lama senilai Rp 100 miliar dan kontrak baru Rp 114 miliar. Salah satu kontrak

baru itu adalah pembangunan pipa dengan Vico Indonesia dengan senilai Rp 40-50 miliar.

Soeroso mengatakan, Perdana Karya menargetkan pendapatan Rp 148,9 miliar dari seluruh kontrak konstruksi tahun depan. Sedangkan unit usaha di bidang pekerjaan penyiapan lahan perkebunan, perseroan optimistis meraih pendapatan sekitar Rp 40,8 miliar.

Hingga kuartal III 2008, perseroan berhasil membukukan pendapatan Rp 311,4 miliar atau tumbuh 99,35% dibandingkan periode sama tahun lalu Rp 159,2 miliar. Namun, laba bersih turun 16,88% dari Rp 26,1 miliar menjadi Rp 21,7 miliar.

“Hingga akhir September 2008, pendapatan perseroan baru memenuhi sekitar 49,01% dari target perseroan akhir tahun, yaitu sebesar Rp 635,3 miliar. Karena itu, kami memproyeksikan pendapatan hingga akhir tahun ini bisa mencapai 88% dari target,” jelas Soeroso.

Perdana Karya telah menghentikan kegiatan eksplorasi di beberapa tambang seperti Berau, Kutai Barat dan Musi Banyuasin, Sumsel. Peralnya, potensi batubara di tambang tersebut kurang memadai. Perseroan akhirnya memilih untuk melanjutkan eksplorasi di Malinau, Marangkayu, serta memperluas tambang di Teluk Dalam. (yoy)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

- KODE: LISTRIK MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI UMUM
 MIGAS GEOLOGI PANSUS ANGKET
 ENERGI ALTERNATIF

AN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 20

TAHUN 2008

PLN Minta Harga Batubara US\$ 60 Per Ton

JAKARTA – PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) meminta penyesuaian kontrak pembelian harga batubara untuk pasokan tahun depan pada kisaran US\$ 50-60 per ton. Penurunan harga kontrak tersebut seiring anjloknya harga minyak mentah di pasar Asia yang mendekati level US\$ 35 per barel yang menyebabkan harga batubara dunia ikut merosot.

Kontrak pembelian batubara untuk kebutuhan pembangkit listrik PLN saat ini menggunakan patokan harga lama sekitar US\$ 80-100 per ton atau di kisaran Rp 800 ribu hingga Rp 1 juta per ton. Permintaan tersebut dinilai wajar karena sesuai dengan indeks harga batubara di pasaran saat ini.

Wakil Direktur PLN Rudiantara mengungkapkan, pihaknya tidak bisa menegosiasi kembali harga batubara saat ini karena terikat kontrak jual beli batubara sebelumnya. Harga batubara pada kontrak lama sekitar US\$ 80-100 per ton dengan kurs sekitar Rp 10 ribu per dolar AS. Karena itu, PLN meminta agar kontrak baru untuk pasokan batubara tahun depan bisa disesuaikan dengan harga ekspor terendah

sesuai harga pasar.

“Kami masih bernegosiasi soal harga pasokan batubara tahun depan dengan pemasok, mudah-mudahan kami bisa memperoleh efisiensi harga di kisaran US\$ 50-60 per ton, atau sekitar Rp 500-600 ribu per ton,” ujar Rudiantara saat dihubungi *Investor Daily* di Jakarta, baru-baru ini.

Kebutuhan batubara PLN pada 2009 sekitar 35 juta ton. Dengan harga US\$ 50-60 per ton, PLN memerlukan sekitar US\$ 1,75-2,1 miliar. Sementara itu, jika harga batubara masih di kisaran US\$ 80-100 per ton, PLN membutuhkan sekitar US\$ 2,8-3,5 miliar untuk belanja bahan bakar batubara.

Rudiantara menambahkan, PLN sudah pasti mendapat pasokan batubara tahun depan dari perusahaan pemegang kontrak perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B), di antaranya PT Adaro Indonesia, PT Berau Coal, dan PT Kideco Jaya Agung. Namun, PLN dan PKP2B hingga kini belum sepakat soal harga yang pasti, terkait anjloknya harga batubara di pasaran internasional.

Dirjen Mineral, Batubara,

dan Panas Bumi Departemen ESDM Bambang Setiawan pernah mengatakan, harga batubara domestik selalu mengacu pada indeks harga batubara nasional (Indonesia Coal Index/ICI), indeks harga batubara Australia Barlow Jongker, indeks harga batubara Jepang Platts, dan indeks harga batubara global (Coal Index Global). “Pemerintah akan memberi sanksi atas penjualan harga batubara yang lebih rendah dari patokan indeks,” kata dia.

Direktur Indonesian Coal Society Singgih Widagdo menilai, permintaan PLN wajar karena posisi perusahaan tersebut sebagai pembeli yang membutuhkan batubara dalam jumlah besar. Namun, permintaan harga PLN di kisaran US\$ 50-60 per ton tersebut masih lebih rendah di bawah harga batubara saat ini di level US\$ 78-79 per ton. “Penyelesaiannya bisa saja dengan mencari titik temu harga pada level harga saat ini dan permintaan harga PLN, sehingga para pihak tidak dirugikan. Acuan harga batubara tetap mengikuti indeks harga di pasaran dunia,” kata dia. (c122)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input checked="" type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> KORAN KONTAN <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA	<input type="radio"/> SUARA KARYA <input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST																													
KODE: <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI <input type="checkbox"/> UMUM <input type="checkbox"/> MIGAS <input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> PANSUS ANGKET <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF																														
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP OKT NOV DES																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN : 20																TAHUN 2008														

BATUBARA

Straits Resources Diizinkan Menambang

DARWIN – Perusahaan energi asal Australia, Straits Resources Ltd, melalui anak usahanya, Straits Asia Resources Ltd, telah dihapus dari daftar sebagai perusahaan pertambangan ilegal di wilayah Pulau Sebuku, Kalimantan Selatan (Kalsel). Manajemen Straits Resources dalam pernyataan tertulisnya, seperti dilansir *Thewest.com.au* di Darwin, Australia, Senin (29/12), menyatakan, pihak kepolisian setempat (Kalsel) telah menghentikan investigasi atas dugaan Straits Asia Resources tidak memperoleh izin untuk melakukan kegiatan pertambangan batubara di wilayah hutan yang menjadi konsesi pertambangannya. "Kami percaya investigasi yang dilakukan kepolisian setempat sangat relevan dilakukan untuk menjaga aktivitas pertambangan di pulau itu," tulis manajemen Straits Resources. Straits Resources saat ini memiliki 47,1% saham Straits Asia Resources. Awal bulan ini, perusahaan sempat dianjurkan untuk menjual sisa sahamnya di Straits Asia Resources. Sebelumnya, Straits Asia Resources dikabarkan akan membelanjakan dana sebanyak US\$ 860 juta selama masa eksplorasi di Kalsel. **(her)**

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

- KODE: LISTRIK MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI UMUM
 MIGAS GEOLOGI PANSUS ANGKET
 ENERGI ALTERNATIF

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 20

TAHUN 2008

Hipmi Desak Pemerintah Sosialisasikan UU Minerba

JAKARTA – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mendesak pemerintah segera menyosialisasikan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara yang baru disahkan, terutama soal ketentuan Pasal 169 ayat a dan b yang membingungkan. Hal ini dilakukan agar ada kepastian hukum berkaitan dengan ketentuan tersebut.

Ketua Pertambangan dan Energi Hipmi Firlie Ganinduto mengungkapkan, pemerintah perlu memberikan penjelasan segera mungkin berkaitan dengan ketentuan peralihan Pasal 169 ayat a dan b, dan semua ketentuan yang diatur dalam undang-undang dengan ketentuan peralihan tersebut, sehingga tidak mudah dipolitisasi. Hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum, yang berkaitan dengan kenyamanan iklim investasi di sektor pertambangan.

"Pemerintah perlu menentukan sikap yang tegas dan memberikan kejelasan soal ketentuan peralihan pada investor di sektor pertambangan, sehingga ada kepastian hukum dalam berinvestasi," ujarnya kepada *Investor Daily* di Jakarta, akhir pekan lalu.

Sebelumnya, Menteri ES-DM Purnomo Yusgiantoro mengatakan, pemerintah akan tetap menghormati kontrak hingga masa berlaku selesai, namun substansi kontrak mesti segera disesuaikan dengan Undang-Undang Pertambangan yang baru. Pemerintah menargetkan, dalam setahun semua kontrak lama bidang pertambangan sudah

bisa disesuaikan dengan Undang-Undang Pertambangan tersebut.

"Yang disesuaikan adalah luas wilayah pertambangan dan ketentuan yang berkaitan dengan pendapatan negara, seperti pajak dan royalti. Pengusaha pertambangan mesti mengembalikan wilayah yang belum ada rencana eksploitasi dan diminta merevisi besaran pajak dan royalti yang masih rendah sesuai ketentuan yang ada," ujarnya.

Firlie menambahkan, penjelasan tersebut masih terkesan rancu, karena disatu sisi pemerintah menghormati kontrak lama, namun di sisi lain pemerintah minta kontrak lama disesuaikan. Hal ini menimbulkan tanda tanya dan ketidakjelasan untuk investor pertambangan. Pemerintah seharusnya menghormati kontrak yang sudah ada hingga selesai masa berlaku.

Undang-Undang Pertambangan tersebut berlaku efektif setelah kontrak selesai atau langsung berlaku untuk kontrak baru setelah undang-undang tersebut disahkan.

Menurut Ketua Bidang Pertambangan dan Energi Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Herman Afif Kusumo, penyesuaian tersebut merupakan hal yang sudah rutin dilakukan pemerintah dan pengusaha dalam jangka waktu tertentu. Hal tersebut tidak melanggar ketentuan yang ada, karena kontrak lama memungkinkan adanya penyesuaian. Pemerintah tetap menghormati kontrak lama hingga selesai. (c122)